



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUSDIONO
2. Jabatan : SEKRETARIS JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
3. NHK : 898257

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 610.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 393 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , WARISAN Rp. 355.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/440 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 141.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1.5 RS MT CKD Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA/NF125 TRF Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.400.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 86.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 838.400.000

III. HUTANG Rp. 20.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 818.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.